



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

BULETIN EDISI XXXVI

21 – 25 SEPTEMBER 2026



TIM REDAKSI



Penanggung Jawab

Azwar Anas, S.H., M.M.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi
Tenggara



Pengarah

Benny Setyawan, S.M., M.M.
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum



Ketua

Muhammad Ahsan Junaid, S.Kom., M.M.
Ketua Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi
Keimigrasian



Anggota

Syndi Claudia La Inda
Pemeriksa Keimigrasian Pemula



Anggota

Faldi Ferdiansyah Anwar
Pemeriksa Keimigrasian Pemula



Anggota

Intan Permatasari Tumin
Pemeriksa Keimigrasian Pemula

KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SULAWESI TENGGARA

Alamat Kantor:

Jl. Abunawas No. 7A Kota Kendari

Ikuti Kami:



imigrasisultra/imigrasisultra_daily



imigrasisultra/imigrasisultra_daily



+62 811-4127-270/Saluran WA Imigrasi Sultra



kanwilsultra.go.id



imigrasisultra



imigrasisultra



imigrasisultra

PROFIL KANTOR

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara merupakan instansi dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara memiliki peran dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi keimigrasian, yang meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian, serta pelaksanaan dukungan manajemen dan administrasi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara membawahi dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi. Ketiga UPT tersebut melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian sesuai wilayah kerja masing-masing, dengan koordinasi Kantor Wilayah untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara terpadu, efektif, profesional, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi.





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA



PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

PROGRAM AKSI

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI

UNTUK DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



AGUS ANDRIANTO
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI

Penguatan Layanan Keimigrasian Berbasis Digital.

1. Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
2. Penyederhanaan Regulasi Visa Bisnis, Golden Visa dan Izin Tinggal Investor yang mendukung peningkatan investasi.
3. Penyuluhan Hukum Keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) untuk mencegah TPPO dan TPPM.
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas Tradisional, Pos Imigrasi lainnya, serta penambahan Autogate di TPI Bandara, TPI Pelabuhan Laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
5. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial bagi masyarakat di sekitar Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.
6. Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pendidikan Vokasi Politeknik Imigrasi.
7. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle).



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

PERINTAH HARIAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

1

Perkuat Integritas dan Profesionalisme

Junjung integritas, profesionalisme, dan jaga nama baik institusi.

2

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Berikan layanan cepat, tepat, dan transparan berbasis digital.

3

Perkuat Pengawasan dan Sinergi Penegakan Hukum

Tegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan dengan kolaborasi lintas instansi.

4

Tingkatkan Kompetensi dan Inovasi

Kembangkan kapasitas diri dan dorong kerja inovatif.

“

Selamat bertugas, semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap
langkah pengabdian kita

“Imigrasi untuk rakyat”

HENDARSAM MARANTOKO, S.H., M.H.
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI



DAFTAR ISI

Perkuat Sinergi, Kanwil Kemenkum Sultra dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Gelar Apel Pagi Bersama	1
Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti Rapat Koordinasi Kemenimipras Tahun 2026	2-4
Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) Tata Kelola Layanan Pengaduan dan Informasi Publik	5
Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Dampingi Kegiatan TIMPORA di Kabupaten Kolaka Utara	7
Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti Sosialisasi Perlindungan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	8-9
Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti FGD Infrastruktur TI Keimigrasian di Batam	10
Perkuat Perencanaan BMN, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti Konsinyering RKBMN Tahun Anggaran 2028	11
Bangun Sinergi dari Desa, Imigrasi Kendari Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM di Kolaka	12-13

Perkuat Sinergi, Kanwil Kemenkum Sultra dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Gelar Apel Pagi Bersama



Kendari, 21 September 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan apel pagi bersama sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarsatuan kerja.

Dalam pelaksanaan apel, Candrafriandi Achmad, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Penegakan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sultra, bertindak sebagai komandan apel. Sementara itu, James Mu'dan, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian, bertindak sebagai pemimpin apel.

Kegiatan apel pagi bersama ini menjadi sarana untuk membangun kedisiplinan, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan koordinasi antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Momentum tersebut juga mencerminkan komitmen untuk terus menjaga hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif.

Melalui sinergi yang terus terjalin, Kanwil Kemenkum Sultra dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi kelembagaan serta memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.



Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti Rapat Koordinasi Kemenimipas Tahun 2026



JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 20–23 September 2026.

Rakor tahun ini mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang Berkualitas dan Berintegritas.”

Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyalarsan langkah jajaran Kemenimipas dalam memperkuat kualitas kinerja, pelayanan publik, tata kelola organisasi, serta integritas aparatur.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Andrianto, dalam arahannya menekankan agar hasil evaluasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menteri juga mendorong seluruh jajaran untuk tetap fokus menuntaskan target kinerja tahun 2026 sekaligus menyiapkan langkah strategis menghadapi pelaksanaan program tahun 2027. Integritas, akurasi data, serta konsistensi dalam pelaksanaan program menjadi bagian penting yang ditekankan dalam forum tersebut.



Salah satu instrumen yang turut diperkuat dalam Rakor adalah pelaksanaan 15 Program Aksi Kemenimipras melalui pemantauan yang lebih terukur dan terintegrasi. Evaluasi terhadap program tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan perbaikan dan tindak lanjut pada masing-masing satuan kerja.

Di bidang keimigrasian, arah tersebut sejalan dengan penguatan yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan terhadap orang asing, penegakan hukum keimigrasian, digitalisasi layanan, serta penguatan integritas jajaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara mengatakan, Rakor menjadi momentum penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan hasil evaluasi di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara konkret di wilayah.





AZWAR ANAS
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

“

Rakor ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melihat kembali capaian yang sudah berjalan, sekaligus memastikan setiap arahan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata di wilayah. Fokus kami tentu bagaimana pelayanan semakin baik, pengawasan semakin optimal, dan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.”



Menurutnya, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara akan menindaklanjuti hasil Rakor melalui penguatan koordinasi, evaluasi pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada seluruh satuan kerja di Sulawesi Tenggara.

Melalui semangat “Dari Evaluasi Menuju Aksi”, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola, integritas, pelayanan publik, serta pelaksanaan fungsi keimigrasian yang profesional dan akuntabel.

Kanwil Ditjenim Sultra Ikuti:

Diskusi Kelompok Terumpun (DKT)

Tata Kelola Layanan Pengaduan dan Informasi Publik



Kendari, 22 September 2026 – Kanwil Ditjenim Sultra mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting kegiatan Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) Tata Kelola Layanan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kegiatan berlangsung pada 22–24 September 2026 dan diikuti secara virtual oleh admin SP4N-LAPOR! serta pengelola PPID pada Kantor Wilayah dan Unit Pelayanan Teknis di seluruh Indonesia.

Kegiatan membahas berbagai aspek tata kelola pengaduan dan informasi publik, mulai dari kebijakan serta pengelolaan SP4N-LAPOR!, konsolidasi data laporan, monitoring dan evaluasi kualitas layanan pengaduan, hingga pembahasan SOP layanan pengaduan. Selain itu, peserta juga memperoleh materi mengenai keterbukaan informasi publik, tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta layanan informasi publik di instansi pemerintah.

Pelaksanaan DKT ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola layanan informasi publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), sekaligus mendukung pemenuhan indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2026.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terus mendukung penguatan tata kelola layanan pengaduan dan informasi publik yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Keberangkatan
Departures



DEPORTASI KEIMIGRASIAN

UNTUK KETERTIBAN,
KEAMANAN DAN KEDAULATAN
NEGARA

Deportasi adalah tindakan administratif **keimigrasian** berupa pengusiran orang asing dari wilayah Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENJAGA KETERTIBAN

Memastikan kepatuhan orang asing terhadap aturan keimigrasian.



MELINDUNGI MASYARAKAT

Mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.



MENDUKUNG KEDAULATAN NEGARA

Menegaskan bahwa setiap orang asing wajib menghormati hukum dan budaya Indonesia.



MENCIPTAKAN LINGKUNGAN AMAN

Bagi warga negara Indonesia maupun orang asing yang taat aturan.

CONTOH PELANGGARAN YANG DAPAT BERUJUNG DEPORTASI



Melebihi masa tinggal (overstay).



Bekerja tanpa izin tinggal yang sah.



Menyalahgunakan atau memberikan keterangan palsu.



Terlibat dalam kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.



Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan tinggal di Indonesia.

HORMATI ATURAN,
NIKMATI INDONESIA DENGAN AMAN

INDONESIA TERBUKA

BAGI MEREKA YANG TAAAT ATURAN

Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Dampingi Kegiatan TIMPORA di Kabupaten Kolaka Utara



Kendari — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan pendampingan kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari di Kabupaten Kolaka Utara.



Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terhadap pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Kegiatan TIMPORA menjadi wadah koordinasi dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.



Melalui pendampingan tersebut, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian secara terpadu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peran Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dalam mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian yang terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti Sosialisasi Perlindungan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Kendari, 22 September 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara.

Kegiatan tersebut membahas berbagai aspek terkait perlindungan anak berkewarganegaraan ganda terbatas serta memberikan pemahaman mengenai ketentuan dan penanganan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak.





Keikutsertaan Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan keimigrasian yang berkaitan dengan anak berkewarganegaraan ganda terbatas.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilakukan secara tepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





Delegasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara bersama jajaran UPT mengikuti FGD di Batam

TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN

Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti FGD Infrastruktur TI Keimigrasian di Batam

Batam, 23 September 2026

Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra bersama 3 UPT di jajarannya mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Fungsi Infrastruktur Teknologi Informasi Keimigrasian tentang Perangkat Pendukung Layanan Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian di Batam.

FGD membahas optimalisasi pengelolaan infrastruktur TI, mulai dari _Google Workspace Overview & Secure Collaboration_, kepatuhan perlindungan data pribadi, pengamanan Aset Tak Berwujud (ATB) khususnya lisensi, hingga pengamanan server dan arsitektur layanan pengaduan SIMKIM (Helpdesk).

MENDUKUNG LAYANAN AMAN DAN PRIMA

Melalui kegiatan ini diharapkan penguatan infrastruktur TI di wilayah semakin optimal dalam mendukung layanan keimigrasian yang aman dan prima.



Perkuat Perencanaan BMN, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ikuti Konsinyering RKBMN Tahun Anggaran 2028



SURABAYA – Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Konsinyering Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2028 yang dilaksanakan pada 22–26 September 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Perencanaan dan Pemeliharaan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap usulan kebutuhan Barang Milik Negara disusun secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan penguatan terkait dasar hukum, mekanisme perencanaan kebutuhan BMN, keterkaitan RKBMN dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, serta pemanfaatan Modul SIMAN V2 dalam proses pengusulan.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penelitian terhadap usulan RKBMN masing-masing satuan kerja. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan organisasi, kelengkapan data serta dokumen pendukung, hingga ketepatan usulan sebelum diteruskan secara berjenjang ke tingkat Eselon I. Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara terus mendorong pengelolaan BMN yang lebih tertib, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata organisasi. Hasil penelitian selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan usulan, pemutakhiran data pada SIMAN V2, serta penerusan usulan RKBMN sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.



Bangun Sinergi dari Desa, Imigrasi Kendari Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM di Kolaka



“

Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat hingga tingkat desa, sekaligus memperkuat peran Imigrasi dalam memberikan edukasi, perlindungan, serta pengawasan keimigrasian yang semakin dekat dengan masyarakat.

”

Kolaka – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Desa Binaan Imigrasi bersama Pemerintah Desa Oke-Oke, Desa Sopura, dan Desa Tanggetada.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Azwar Anas, beserta jajaran dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi. Kehadiran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan selaras dengan kebijakan serta tujuan penguatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran keimigrasian di wilayah.





Kerja sama ini menjadi langkah kolaboratif dalam menghadirkan edukasi keimigrasian lebih dekat kepada masyarakat, khususnya terkait migrasi yang aman, legal, dan sesuai prosedur. Sinergi dengan pemerintah desa juga diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi serta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungan masyarakat.

Melalui Program Desa Binaan Imigrasi, masyarakat didorong untuk semakin memahami berbagai modus dan risiko TPPO maupun TPPM sehingga mampu mengenali potensi kerawanan sejak dini serta terhindar dari tawaran keberangkatan ke luar negeri melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Ikuti Kami:



imigrasisultra/imigrasisultra_daily



imigrasisultra/imigrasisultra_daily



+62 811-4127-270/Saluran WA Imigrasi Sultra



kanwilsultra.go.id



imigrasisultra



imigrasisultra



imigrasisultra





IMIGRASI **UNTUK RAKYAT**

